

ABSTRAK

ARIF BUDI KUSUMA (2110622002). *Kepastian Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Menjadi Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.* Dibimbing oleh Suherman

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengaturan kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan utang di lembaga keuangan bank serta bentuk eksekusi terhadap kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang di lembaga keuangan bank apabila terjadi wanprestasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan, meliputi bahan hukum primer berupa perundangan yang meliputi kekayaan intelektual dan jaminan, bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan Rikson Sitorus selaku Ketua Kelompok Kerja Analis Hukum Bidang Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham dan Muhammad Fauzy selaku Koordinator Fasilitasi Kekayaan Intelektual II Kemenparekraf/Baparekraf, karya tulis ilmiah dan dokumen terkait. Validitas bahan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi bahan hukum guna menemukan kesesuaian bahan hukum dengan isu yang dijawab.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Kekayaan Intelektual sebagai kebendaan yang memiliki sifat bergerak dan tidak berwujud sama dengan hak kebendaan lainnya dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, seperti dapat dijadikan objek jaminan kredit oleh pemilik kekayaan intelektual. PP 24 tahun 2022 membuka peluang untuk diadakannya semua jenis KI menjadi jaminan perbankan. (2) Eksekusi terhadap HKI sebagai Jaminan dapat dilakukan dengan; apabila jaminan diikatkan dengan fidusia maka dapat dieksekusi mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia, apabila menggunakan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, proses penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak yang ada, apabila menggunakan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif, maka hak tagih dapat dieksekusi dengan menuntut pembayaran melalui proses hukum sesuai dengan perjanjian yang ada.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Jaminan, Eksekusi

ABSTRAC

ARIF BUDI KUSUMA (2110622002). *LEGAL CERTAINTY OF INTELLECTUAL PROPERTY THAT BECOMES AN OBJECT OF DEBT COLLATERAL IN BANK FINANCIAL INSTITUTIONS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 2022.* Guided by Suherman

The purpose of this study is to understand the form of intellectual property regulation that is the object of debt collateral in bank financial institutions and the form of execution of intellectual property that is the object of debt collateral in bank financial institutions in the event of default according to Government Regulation Number 24 of 2022. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of legislation covering intellectual property and collateral, secondary legal materials in the form of interviews with Rikson Sitorus as Chair of the Legal Analyst Working Group for Copyright and Industrial Design, DJKI, Ministry of Law and Human Rights and Muhammad Fauzy as Coordinator of Intellectual Property Facilitation II, Ministry of Tourism and Creative Economy/Baparekraf, scientific papers and related documents. The validity of legal materials is carried out by harmonizing legal materials in order to find the suitability of legal materials with the issues being answered.

Based on the research results, it was found that: (1) Intellectual Property as an object that has a movable and intangible nature, the same as other property rights, can be transferred and assigned to other parties, such as being used as a credit guarantee object by the owner of the intellectual property. PP 24 of 2022 opens up opportunities for all types of IP to be used as bank collateral. (2) Execution of IP as Collateral can be carried out by; if the collateral is bound by fiduciary, it can be executed following the provisions contained in the Fiduciary Law, if using a contract in creative economic activities, the settlement process is carried out based on the provisions of the existing contract, if using the right to collect in creative economic activities, the right to collect can be executed by demanding payment through a legal process in accordance with the existing agreement.

Keywords: Intellectual Property, Collateral, Execution